

2011

IDSS

Finance



LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN KE IV FIK KSM KAB. TAKALAR

Menebar Semangat Menuju Takalar yang Demokratis

A. PENDAHULUAN



Latar Belakang

Tujuan utama dari Program ACCESS Phase II adalah untuk mendorong terlaksananya proses-proses Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Takalar, dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis. Ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yakni

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di optimalkan penerapannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya visi FLA Kab. Takalar : "Terwujudnya Tata Pemerintahan Lokal Demokratik yang Amanah di Kabupaten Takalar".

Kegiatan yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun atau memasuki triwulan ke IV telah menampakkan hasil yang semakin signifikan antara lain lahirnya dokumen RPJMDes pada 25 desa, RKPD pada 13 desa yang tersusun dari hasil Perencanaan yang dilakukan secara partipatif oleh warga yang difasilitasi oleh 3 orang KPM dari masing - masing desa dibantu oleh seorang Fasilitator Pendukung. Program yang semakin hari semakin populer dan diminati baik dikalangan Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa ini sebagai Program baru yang unik karena melibatkan semua unsur dalam masyarakat tanpa terkecuali antara lain Warga Prasejahtera/miskin, perempuan, kaum muda/anak, dan kaum termarjinalkan lainnya/cacat mulai menjadi rujukan perencanaan baik pemerintah maupun pihak lain seperti PNPM Mandiri. Terbukti dengan kesepakatan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa dengan pihak PNPM Kabupaten Takalar, bahwa dokumen RPJMDes yang difasilitasi oleh FIK KSM dan ACCESS yang harus menjadi rujukan bagi PNPM dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa, semua pihak sudah terintegrasi.

Perubahan lain yang semakin nampak adalah partisipasi aktif warga terutama perempuan, kaum muda dan golongan marjinal semakin tinggi. Terlihat pada proses musyawarah/FGD yang diselenggarakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dimasing – masing desa semakin hidup dan penuh antusiasme.

Nama Organisasi Pelaksana	FIK KSM Kab. Takalar
Provinsi	Sulawesi Selatan
Judul Program	Program Peningkatan Kapasitas Warga dan Optimalisasi Kebijakan Publik untuk mendukung proses Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Takalar
No. PGA	82-002-002
Nama Penulis Laporan	Nurlinda
Tanggal Pelaporan	10 July 2011
Tahun Pelaporan	2011 Triwulan ke : 4

B. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Tabel 1. Kegiatan yang Dilakukan selama Periode Pelaporan ini

No	Kegiatan	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Keluaran		Alasan Perubahan
			Direncanakan	Direncanakan	
		Ya/tdk			
1.	Fasilitasi Proses Perencanaan Penganggaran		a	Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dalam rangka menyusun agenda pembangunan desa.	Teridentifikasinya kekuatan-kekuatan dalam rangka menyusun agenda pembangunan desa.
			b	Menyusun data Peringkat Kesejahteraan Masyarakat, kehidupan sosial ekonomi warga desa, dll.	Adanya data Peringkat Kesejahteraan Masyarakat kehidupan sosial ekonomi warga desa
			c	Memetakan asset-asset sumberdaya yang ada di desa, sebaran rumah penduduk dan akses kontrol terhadap sumber daya alam	Terpetaknya asset-asset sumberdaya yang ada di desa, sebaran rumah penduduk dan akses kontrol terhadap sumber daya alam

		d	Melihat keterlibatan keluarga miskin, perempuan, kaum muda dan termarjinalkan lainnya dalam setiap FDG yang diselenggarakan oleh KPM dan Fasduk dan mendokumentasikan proses sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.	Terdokumentasikannya proses yang melibatkan seluruh unsure termasuk keluarga miskin, perempuan, kaum muda dan termarjinalkan lainnya dalam setiap FDG yang diselenggarakan oleh KPM dan Fasduk serta terinternalisasikannya terdokumentasikannya capaian dalam pelaksanaan kegiatan termasuk menginternalisasi nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.	
		e	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah dilakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	terinternalisasinya pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah dilakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	
		f	Mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh Tim implementasi dan KPM serta menentukan strategi penanggulangan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.	Terpetakannya tantangan yang dihadapi oleh Tim implementasi dan KPM serta tersusunnya strategi tindakan penanggulangan untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.	

			g	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat.	Terbangunnya media belajar bersama antar Kader Perberdayaan Masyarakat (KPM), warga dan organisasi warga yang ada dalam desa masing - masing.	
2.	Review refleksi proses serta hasil - hasil perencanaan dan penganggaran partisipatif		a	Melakukan review terhadap proses hasil-hasil Perencanaan masyarakat yang dilakukan bersama	Melakukan review terhadap proses hasil-hasil Perencanaan masyarakat yang dilakukan bersama	
			b	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat	
			c	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah di lakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah di lakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	
				Mengidentifikasi temuan-temuan kunci sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.	Mengidentifikasi temuan-temuan kunci sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.	

3.	Lokalatih dan penulisan RPJMDes		a Memberikan bekal keterampilan menulis bagi Fasduk, KPM dan Pemdes dalam menyusun Dokumen RPJMDes/Kel	Memberikan bekal keterampilan menulis bagi Fasduk, KPM dan Pemdes dalam menyusun Dokumen RPJMDes/Kel	
4.	Finalisasi Penulisan Dokumen RPJMDes/Kel		Tersusunannya RPJMDesa/kelurahan berdasarkan format dan kaidah-kaidah penulisan	Tersusunannya RPJMDesa/kelurahan berdasarkan format dan kaidah-kaidah penulisan	
5.	Penyusunan Dokumen Penjajakan dan RPJMDes/Kel		Tersedianya dokumen RPJMDes/Kelurahan yang lengkap yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk desa dampingan kedua.	Tersedianya dokumen RPJMDes/Kelurahan yang lengkap yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk desa dampingan kedua.	
6.	Lokakarya Memperkuat Proses Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan		a Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan	
			b Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun klasifikasi masyarakat yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan utamanya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarginalkan lainnya	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun klasifikasi masyarakat yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan utamanya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarginalkan lainnya	

			c	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarjinalkan lainnya	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarjinalkan lainnya	
--	--	--	---	---	---	--

No	Kegiatan	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Keluaran		Alasan Perubahan
			Direncanakan	Realisasi	
		Ya/Tidak			
1	Fasilitasi Proses Penjajakan	Ya	a	Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dalam rangka menyusun agenda pembangunan desa.	Teridentifikasinya kekuatan-kekuatan yang digunakan untuk menyusun agenda pembangunan desa.
			b	Menyusun data Peringkat Kesejahteraan Masyarakat	Tersusunnya data Peringkat Kesejahteraan Masyarakat
			c	Memetakan asset-asset sumberdaya yang ada di desa, sebaran rumah penduduk dan akses kontrol terhadap sumber daya alam	Terpetakannya asset-asset sumberdaya yang ada di desa, sebaran rumah penduduk dan akses kontrol terhadap sumber daya alam

			d	Melihat keterlibatan keluarga miskin, perempuan, kaum muda dan termarjinalkan lainnya dalam setiap FDG yang diselenggarakan oleh KPM dan Fasduk dan mendokumentasikan proses sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.	keluarga miskin, perempuan, kaum muda dan termarjinalkan lainnya telah terlibat aktif dalam setiap FDG yang diselenggarakan oleh KPM dan Fasduk dan hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama terdokumentasikan dengan baik.	
			e	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah dilakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	Terpetakannya pembelajaran yang terkait dengan kekuatan dan hambatan yang di peroleh dari apa yang telah dilakukan ncanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.	
			f	Menemukenali tantangan yang dihadapi oleh Tim implementasi dan KPM serta menentukan strategi penanggulangan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.	terpetakannya tantangan yang dihadapi oleh Tim Implementasi dan KPM serta menentukan strategi penanggulangan untuk perbaikan.	
			g	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat.	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat.	
2.	Lokakarya memperkuat Musrenbang	Ya	A	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan	LPM/Pemerintah desa memahami pentingnya partisipasi warga dalam proses Musrenbang	

			B	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun klasifikasi masyarakat yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan utamanya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarginalkan lainnya	LPM/Pemerintah desa berkomitmen untuk melibatkan seluruh unsure masyarakat antara lain prasejahtera/warga miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marjinal lainnya.	
			C	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun kebutuhan.	Paham tentang pentingnya integrasi dalam musrenbang. Menemukan strategi dalam menghadapi kelompok elite di desa pada saat proses Musrenbang berlangsung	
3.	Review Refleksi hasil penjajakan partisipatif	Ya	a	Melakukan review terhadap proses hasil-hasil Perencanaan masyarakat yang dilakukan bersama.	Teridentifikasinya hasil - hasil perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama - sama	
			b	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat	Teridentifikasinya hasil - hasil yang membangggakan baik oleh warga maupun oleh KPM dari masing- masing desa serta tantangan maupun kendala teknis yang dialami baik oleh Tim implementasi maupun Mitra Langsung.	

4.	Loklatih Perencanaan dan Penganggaran	Ya	a	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan KPM sebagai Fasilitator Desa tentang bagaimana memfasilitasi dalam membangun visi bersama dan strategi mobilisasi sumber daya.	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan KPM sebagai Fasilitator Desa dalam memfasilitasi perumusan Visi dan strategi mobilisasi sumber daya
			b	Meningkatkan keterampilan KPM sebagai Fasilitator Desa dalam mengembangkan alat-alat perencanaan sederhana sesuai kebutuhan.	Meningkatnya keterampilan KPM sebagai Fasilitator Desa dalam mengembangkan alat - alat perencanaan yang sederhana sesuai kebutuhan.
			c	Meningkatkan kemampuan KPM sebagai Fasilitator Desa dalam menumbuhkembangkan pemahaman hak dan tanggungjawab para pihak.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan KPM sebagai Fasilitator Desa dalam menumbuh kembangkan pemahaman dan tanggung jawab para pihak.
			d	Menyusun jadwal dan desain fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran pada 13 desa pertama	tersusunnya jadwal dan desain fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran pada 13 desa pertama
			c	Menyusun VISI bersama masyarakat selama 5 tahun ke depan	Terumuskannya VISI dan atau cita - cita realistis masyarakat untuk 5 tahun ke depan.
			d	Memetakan asset-asset sumberdaya yang ada di desa	Terpetakannya asset - asset sumberdaya yang di masing - masing desa pada 13 desa tahap I
			e	Memfasilitasi lahirnya RPJMdes/Kel dan RKP des	Tersedianya dokumen RPJMDes/Kel pada 13 desa tahap pertama

			c	Menumbuhkan sikap KPM yang memposisikan diri sebagai orang yang belajar dan berpikir kreatif layaknya seorang fasilitator andalan serta keterampilan melakukan analisa informasi.	KPM mampu memposisikan diri sebagai orang yang belajar dan berpikir kreatif selayaknya seorang fasilitator andalan serta keterampilan melakukan analisa informasi.
KEGIATAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN					
1.	Review Refleksi proses Musrenbang		a		Terdokumentasikannya pengalaman penting dalam proses Musrenbang desa, Kecamatan.
					Terpetakannya potensi, peluang, hambatan dan tantangan dalam proses musrenbang desa
					Lahirnya rekomendasi perbaikan Musrenbang di masa yang akan datang sebagai modul perencanaan yang partisipatif bagi pembangunan daerah
2.	Partner Progres Review (PPR)		a		Teridentifikasinya cerita sukses dan pembelajaran penting dari masing – masing KPM dalam melakukan proses Penjajakan dan Perencanaan Partisipatif di desa.
			b		Teridentifikasinya Perubahan utama dan penanda kemajuan dari masing-masing unsure antara lain perubahan prilaku ditingkat Lembaga, Mitra

				Langsung, Mitra Strategi dan warga sebagai penerima manfaat.
			c	Terdokumentasikannya proses selama 8 bulan, dan tersusunnya rencana tindak lanjut 6 bulan ke depan beserta strategi pengembangannya.
	Penyiapan Sosial		a	Koordinasi dan silaturahmi yang terus menerus menghasilkan ikatan emosional masing - masing pihak semakin terjalin baik sehingga program semakin tersosialisasi.
			b	Semakin banyak desa yang menunjukkan ketertarikannya pada program, terbukti dengan adanya surat permintaan kerjasama dari 11 desa baru.

C. PESERTA DALAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Tabel 2. Kelompok Peserta Kegiatan

	KELOMPOK PESERTA KEGIATAN								
	Masyarakat	DMS	Pemerintah	DPRD	Donor	Pers	Pihak	TOTAL	

KEGIATAN					Desa		Kecamatan		Kabupaten		Provinsi		Pusat								Swasta			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Fasilitasi Proses Penjajakan	394	534	9	3	50	16	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	514
Lokakarya memperkuat Musrenbang	0	0	5	9	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10
Review Refleksi hasil penjajakan partisipatif	8	28	9	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	21	42
Lokalah Perencanaan dan Penganggaran	9	28	9	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	22	41
Review Refleksi proses Musrenbang	13	13	9	11	13	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	39	28
Partner Progres Review (PPR)	10	22	22	27	6	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	41	55
Penyiapan Sosial	103	183	2	8	36	2	8	1	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	201
Total Peserta Kegiatan																						757	891	

D. RINGKASAN CAPAIAN DALAM PERIODE INI

Tabel 3. Capaian Program sejak Program dimulai sampai dengan Periode Pelaporan ini

No	Indikator	Total pada saat melapor (Total to date)	
A	Lengkapi seluruh indikator di bagian ini		
1	Jumlah total Fasilitator Komunitas (KPM) yang dilatih sejak Program dimulai sampai saat ini	L : 20 orang	P : 57 orang
2	Jumlah total kelompok yang didukung melalui Rencana Aksi sejak Program sampai saat ini (Penerima Manfaat pada Program Perencanaan Partisipatif)	Jumlah sampai sekarang (orang)	
	Petani	84	
	Nelayan	102	
	Kelompok Ekonomi	36	
	PNS	11	
	Pemdes	75	
	Kelompok Pemuda	75	
	RT	179	
	Masyarakat Prasejahtera lainnya	359	
	Kelompok Wanita Tani	16	
	Buruh / tukang	25	
3	Alokasi anggaran pemerintah yang dikomitmenkan untuk mendukung Rencana Aksi Mitra	Jumlah : Rp. 32.865.000,-	
4	Jumlah total dan jenis dokumen hukum dan kebijakan di tingkat desa dan kabupaten	Jumlah Dokumen Perdes (13 Perdes dan 1 Perbup)	
B	Bagian ini diisi bila Program berkaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif		
1	Jumlah total RPJMDes yang dibuat secara partisipatif sejak program	13	

2	Persentase kegiatan sesuai dengan RPJMDes/RKP yang dilaksanakan sejak program dimulai sampai saat ini	-
----------	---	---

E. HASIL – HASIL TAK TERDUGA

Tabel 4. Hasil – hasil tak terduga

No	Hasil – hasil Tak Terduga	Faktor faktor yang Berkontribusi Terhadap Hasil
1	Pemerintah Desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Pemerintah Desa / Kelurahan mengetahui bahwa Dokumen Perencanaan (RPJMDes) mutlak dimiliki oleh Desaberdasarkan aturan perundang – undangan.
2	Dari segi jumlah, perempuan yang terlibat dalam kegiatan/program semakin meningkat dari laki – laki Keterlibatan warga termarjinalkan (perempuan, warga miskin, kaum muda/anak, dan kelompok termarjinalkan lainnya, semakin signifikan. Bukan hanya dari segi kehadiran, akan tetapi dari partisipasi yang lain seperti memberi ide-ide, ikut berbicara secara aktif dan usulan kegiatan yang terakomodir dalam musrenbang juga menampakkan keterwakilan mereka.	Strategi yang digunakan oleh Fasduk dan KPM dalam menghadirkan warga termarjinalkan seperti perempuan, warga miskin, kaum muda/anak dan kelompok marjinal lainnya seperti mengundang dengan mencantumkan nama, mendatangi dan memanggil langsung, serta menjelaskan manfaat dan pentingnya suara mereka dalam perencanaan, menjadi pemicu semangat bagi warga yang berdampak pada partisipasi aktif yang semakin meningkat.
3	Elaborasi metodologi menjadi hal yang sangat menarik dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berbasis masyarakat	Kemampuan Tim Implementasi program dalam memadukan methodology CLAPP – GSI dan pendekatan CBIA menjadi kombinasi yang menarik karena perencanaan yang dilakukan berdasarkan fakta bukan persepsi. Karena dalam melakukan kajian mendalam dan FGD, Fasilitator Pendukung dan KPM telah dibekali

	keterampilan teknik wawancara dan membuat pertanyaan kunci yang menghindari pertanyaan persepsi.
4	Rekomendasi hasil Review Refleksi proses musrenbang "Proses perencanaan partisipatif yang difasilitasi oleh FIK KSM dan ACCESS Phase 2 harus dijadikan model perencanaan (Musrenbang) di Kabupaten Takalar
5	FIK KSM Takalar melalui Tim Kreatif Admin telah mampu menciptakan software sendiri untuk pengimputan data sensus yang dikonversi ke dalam system informasi berbasis internet.
	Sosialisasi/desiminasi yang dilaksanakan terus menerus dibantu oleh pemerintah desa melalui Apdesi memberikan dampak positif bagi terbangunnya pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya proses dalam perencanaan partisipatif.
	Selain data sensus yang tersedia dari 25 desa dan perangkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terdokumentasikan dengan baik, sumberdaya manusia juga cukup tersedia sehingga menjadi penopang bagi munculnya kreatifitas baru dari Tim Implementasi.

F. INKLUSI GENDER DAN SOSIAL

Membangun komunikasi yang lebih dinamis baik dengan Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dan desa yang merupakan ciri FIK KSM dalam mendorong nilai – nilai kearifan lokal untuk mencapai Tata Pemerintahan yang Demokratis adalah prasyarat yang harus dijunjung tinggi oleh Tim Implementasi Program dan Mitra Langsung agar nilai – nilai Gender Social Inclusive (GSI) dapat di eksplisitkan.

Desiminasi tentang manfaat dan pentingnya membuka ruang dan menciptakan peluang bagi bagi masyayrakat dan pemerintah, terus dilakukan bahkan dengan volume yang semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan upaya agar output yang direncanakan dapat tercapai.

Memberikan undangan baik tertulis maupaun mendatangi langsung kepada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan kelompok marjinal lainnya untuk mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di desa masih tetap menjadi strategi yang efektif yang dilakukan oleh KPM dan Pemdes agar mereka termotivasi untuk ikut terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Meningkatkan kapasitas (Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap) pada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan



termarjinal lainnya agar dapat berkontribusi lebih besar pada setiap kegiatan/pertemuan untuk menyampaikan ide/gagasan serta mengambil keputusan, juga senantiasa dilakukan secara terus menerus.

Waktu pelaksanaan pertemuan dan atau kegiatan disesuaikan dengan waktu luang bagi perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinal lainnya tetap dilakukan oleh KPM dalam melaksanakan FGD di desa masing - masing.

G. PELUANG DAN RESIKO

Peluang

Desiminasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin/terus menerus ke pemerintah baik kabupaten, kecamatan dan desa juga ke kalangan masyarakat telah membuahkan hasil. Hal ini dapat terukur dari komitmen pemerintah desa yang dituangkan dalam rekomendasi pada saat review refleksi proses musrenbang bahwa "proses perencanaan partisipatif yang dilaksanakan saat ini hendaknya menjadi model pelaksanaan musrenbang di masa-masa yang akan datang meskipun program dari FIK KSM dan ACCESS sudah tidak ada lagi.

Resiko - resiko

- Proses perencanaan yang diharapkan menjadi model perencanaan Musrenbang dimasa yang akan datang bisa saja hanya impian belaka jika tidak dibackup dengan baik.
- Dokumen Perencanaan dan penggaran partisipatif yang telah dihasilkan bisa jadi tidak dijadikan acuan bagi implementasi program/kegiatan di masyarakat (tidak termanfaatkan).

Cara Mengatasinya adalah :

- Mendesiminasikan program beserta manfaatnya secara berkala dan terus menerus baik kepada warga, pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
- Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk ikut terlibat secara sadar dan kritis dalam mengawal nilai - nilai Partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kab. Takalar
- Mengintegrasikan hasil perencanaan dengan program pemberdayaan lainnya yang ada dikabupaten Takalar.
- Mendorong lahirnya regulasi tentang Perencanaan partisipatif
- Memperkuat kapasitas warga untuk mendorong lahirnya Perdes dan APBDdes yang partisipatif

H. BELAJAR DARI PENGALAMAN

Program yang dilaksanakan dengan menginternalisasi nilai – nilai GSI, Dimana warga miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marginal lainnya menjadi target utama untuk memperoleh kesetaraan dalam hal memperoleh dan memanfaatkan peluang, maka FIK KSM sebagai lembaga yang mengawal program ini terus berupaya untuk melakukan inovasi – inovasi atau kreatifitas baru, agar program bukan hanya menarik dari sisi proses tetapi juga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Sejak program ini dimulai, dimana setiap kegiatan yang dilaksakan selalu mengutamakan keterlibatan aktif perempuan, warga miskin, kaum muda dan termarjinalkan lainnya, sehingga kiat – kiat cerdas tetap dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat warga untuk tetap terlibat dalam setiap proses belajar bersama yang dilakukan agar perempuan dan kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan bisa meningkat kemampuannya dan semakin kritis dalam mengawal dan mendorong terpenuhinya hak – hak mereka.

Indicator yang kami gunakan untuk mengukur sejauhmana GSI terinternalisasi dalam setiap tindakan warga adalah kegiatan yang muncul dalam draf RKP apakah sudah responsive gender, warga miskin, kaum muda dan kelompok marginal lainnya atau tidak. Tetapi RKP yang terfasilitasi oleh KPM telah menunjukkan bahwa nilai – nilai GSI telah dipraktekkan dengan baik meskipun masih harus diperbaiki dan disempurnakan.



Caranya adalah :

- Memotivasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan hadir pada setiap pertemuan
- Pelaksanaan pertemuan disesuaikan dengan waktu luang dan tempat pertemuan agar perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan bisa hadir.
- Mengajak dan memberi undangan kepada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan pada setiap pertemuan Perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan mempunyai hak yang sama sebagai warga untuk berpartisipasi pada pembangunan desa

- Dengan peluang – peluang yang ada, maka perempuan akan diberi peran dan tanggungjawab yang harus banyak dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dan berdampak positif pada perempuan untuk mensejahterakan hidupnya

I. RENCANA KEGIATAN BERIKUTNYA

Tabel 5.

Kegiatan yang Direncanakan untuk Dilakukan selama Periode Pelaporan Berikut

No	Kegiatan yang Direncanakan		Keluaran yang Direncanakan
1.	Fasilitasi Proses Perencanaan Penganggaran	a	Teridentifikasinya kekuatan-kekuatan dalam rangka menyusun agenda pembangunan desa.
		b	Adanya data Peringkat Kesejahteraan Masyarakat kehidupan sosial ekonomi warga desa
		c	Terpetakan asset-asset sumberdaya yang ada di desa, sebaran rumah penduduk dan akses kontrol terhadap sumber daya alam
		d	Melihat keterlibatan keluarga miskin, perempuan, kaum muda dan termarjinalkan lainnya dalam setiap FDG yang diselenggarakan oleh KPM dan Fasduk dan mendokumentasikan proses sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.
		e	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah dilakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.
		f	Menemukanali tantangan yang dihadapi oleh Tim implementasi dan KPM serta menentukan strategi

			penanggulan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.
		g	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat.
2.	Review refleksi proses serta hasil – hasil perencanaan dan penganggaran partisipatif	a	Melakukan review terhadap proses hasil-hasil Perencanaan masyarakat yang dilakukan bersama
		b	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat
		c	Memetik pembelajaran baik yang terkait dengan kekuatan maupun hambatan yang di peroleh dari apa yang telah di lakukan dan apa yang dirasakan selama proses perencanaan masyarakat termasuk kiat-kiat fasilitasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.
			Mengidentifikasi temuan-temuan kunci sebagai hasil pelaksanaan kegiatan termasuk nilai-nilai GSI untuk merancang proses dan tindakan aksi bersama.
3.	Loklatih dan penulisan RPJMDes	a	Memberikan bekal keterampilan menulis bagi Fasduk, KPM dan Pemdes dalam menyusun Dokumen RPJMDes/Kel
4.	Finalisasi Penulisan Dokumen RPJMDes/Kel		Tersusunannya RPJMDesa/kelurahan berdasarkan format dan kaidah-kaidah penulisan
5.	Penyusunan Dokumen Penjajakan dan RPJMDes/Kel		Tersedianya dokumen RPJMDes/Kelurahan yang lengkap yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk desa dampingan kedua.
6.	Lokakarya Memperkuat Proses Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	a	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan

		b	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun klasifikasi masyarakat yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan utamanya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarginalkan lainnya
		c	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarginalkan lainnya

J. CERITA PERUBAHAN BERMAKNA

Perencanaan partisipatif adalah sebuah terobosan baru di Kabupaten Takalar yang cukup menarik perhatian berbagai pihak. Kegiatan yang melibatkan banyak orang terutama warga miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok termarginalkan lainnya merupakan fenomena baru yang diharapkan dapat mewarnai perubahan sosial di Kabupaten Takalar. Upaya perubahan menuju pemerintahan yang demokratis bukan baru dimulai sekarang namun telah sering diupayakan, akan tetapi aksi yang digalang tidak pernah tuntas sehingga hasil yang diharapkan terjadi tidak dapat maksimal. Program perencanaan partisipatif merupakan langkah dan terobosan baru yang diharapkan menjadi pijakan yang kuat untuk proses – proses berikutnya.

Berikut adalah beberapa kutipan langsung dari Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan warga.

1. Bapak Pahlawang Maulana, SH (Kades Aeng Batu-batu, ketua Apdesi Kab. Takalar)

“Awalnya saya menduga program ini sama dengan program-program yang lain, saya hanya ikut meramaikan karena desa saya sudah punya dokumen RPJMDes. Akan tetapi di luar dugaan saya ternyata proses yang dilakukan KPM kami sungguh membuat saya harus angkat topi pada ACCESS dan FIK KSM atas program yang diusungnya. Semua warga tanpa terkecuali mendapat ruang dan peluang yang sama meskipun ada perlakuan yang lebih istimewa (prioritas) terhadap warga miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marginal. Saya yakin proses yang cantik akan menghasilkan dokumen perencanaan yang cantik dan saya semakin yakin ketika saya diberi kehormatan untuk mewakili pemerintah desa menghadiri Temu Bintang Perencanaan di Clarion.

Saya atas nama pemerintah desa dan ketua Apdesi akan membantu mensosialisasikan program ini kepada pemerintah desa lainnya". *(dikutip dari : PPR zona 1)*

2. Nurdin Tula (Kepala Desa Parappunganta)

"Saya secara pribadi sudah lama mengenal ketua FIK KSM, bahkan sebelum saya menjabat jadi kepala desa tahun 2002, saya masih ketua BPD dan ibu Indah Fasilitator JICA, sehingga saya meminta khusus agar desa saya didampingi. ketika sosialisai program di Kabupaten, saya sudah yakin bahwa program ini sangat bagus. Dan ternyata terbukti, proses yang dilakukan KPM bersama Fasduk sangat sempurna sehingga warga puas karena mereka terlibat dalam perencanaan secara penuh, saya yakin model ini akan sangat membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan di masa yang akan datang". *(dikutip dari : Workshop penguatan musrenbang)*

3. Alimuddin, SE (Ketua BPD Desa Towata)

"Dokumen RPJMDes yang ada saat ini kami miliki, dibuat untuk memenuhi syarat pencairan ADD dan sama sekali tidak disusun berdasarkan kebutuhan warga. Bahkan dokumen tersebut dibuat dari copy paste milik desa lain. Setelah mengikuti semua tahapan proses dari program ini, kami nyatakan siap merubah dokumen RPJMDes yang ada saat ini sebagai bentuk komitmen kami demi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik . *(dikutip dari : pleno hasil penjajakan Desa Towata)*

4. Abd. Harist Basri (Fasduk Bontoloe)

Dokumen RPJMDes yang difasilitasi KPM Desa Bontoloe telah dijadikan contoh oleh PNPM Mandiri dan rencananya akan menjadi rujukan bagi desa – desa yang lain *(dikutip dari : PPR zona 2)*.

Sehian & Terima kasih

